

ORIENTASI BUDAYA POLITIK PEREMPUAN

*(Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNG Pada
Pemilihan Umum 2019)*

Oleh :
Ramli Mahmud¹
Rasid Yunus²

ABSTRAK

Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo tahun 2017 menunjukkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 397.019 orang dari total pemilih 791.129. Hal ini menandakan bahwa jumlah pemilih perempuan mendominasi pemilih laki-laki, walaupun pada segi sex ratio hanya berkisar 0,99% tingkat perbedaannya. Dengan demikian maka partisipasi politik perempuan pada pelaksanaan pemilihan umum sangat mendukung agenda demokrasi lokal. Tinggi atau rendahnya angka partisipasi politik sangat ditentukan oleh budaya politik warga negara, oleh sebab itu perlu dilihat bagaiman orientasi budaya politik pemilih dalam berpartisipasi pada setiap pemilu, termasuk pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya. Oleh sebab itu, Penelitian ini ingin menganalisis dan menginterpretasikan orioentasi budaya politik perempuan pada Pemilihan Umum 2019. Dengan demikian maka, penelitian diharapkan dapat menjawab pertanyaan ; 1) Apa orientasi budaya Politik Perempaun dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum, 2) Bagaimana peran keluarga sebagai agen orientasi politik pemilih perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi dan jawaban terkait permasalahan orientasi budaya politik dan bagaimana meningkatkan partisipasi politik partisipan bagi pemilih perempuan menjelang Pemilu 2019.

Kata kunci: Orientasi Budaya Politik , Perempuan, Pemilihan Umum

ABSTRACT

Data of the Gorontalo Province General Election Commission (KPU) in 2017 shows that the female Permanent Voter List (DPT) in the election of the Governor and Deputy Governor numbered 397,019 people out of a total of 791,129 voters. This indicates that the number of female voters dominates male voters, even though in terms of sex the ratio is only around 0.99%. Thus, women's political participation in the holding of general elections strongly supports the local democratic agenda. High

¹ Staf Pengajar dan Peneliti Universitas Gorontalo

² Staf Pengajar dan Peneliti Universitas Gorontalo

or low numbers of political participation is largely determined by the political culture of citizens, therefore it is necessary to see how the orientation of the political culture of voters in participating in each election, including women voters in exercising their voting rights. Therefore, this research wants to analyze and interpret the orientation of women's political culture in the 2019 General Elections. Thus, research is expected to answer questions; 1) What is the cultural orientation of the Politics of Women in exercising their right to vote in general elections, 2) What is the role of the family as an agent of political orientation of women voters. The results of this study are expected to provide solutions and answers related to the problems of political culture orientation and how to increase political participation of participants for women voters ahead of the 2019 elections.

Keywords: Political Cultural Orientation, Women, General Elections

A. PENDAHULUAN

Sesuai dengan hasil riset Ramli Mahmud (2010)³, perilaku pemilih di Kota Gorontalo dominan dipengaruhi oleh perilaku sosiologis dan psikologis, namun demikian pertimbangan keputusan pilihan politik pada saat pemilihan umum dipengaruhi oleh perilaku psikologis. Artinya ada kecenderungan fenomena terintegrasinya pertimbangan perilaku sosiologis kedalam perilaku psikologis, sehingganya identifikasi partai menjadi pertimbangan utama pemilih dalam memilih kandidat calon kepala daerah. Acuan lain yang dapat dijadikan rujukan adalah riset Ramli dkk (2017)⁴, orientasi politik pemilih pemula di Kota Gorontalo sangat dipengaruhi oleh keputusan politik orang tua. Berangkat dari dua temuan tersebut maka, dapat digaris bawahi bahwa pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di kota Gorontalo dilatarbelakangi oleh pertimbangan identifikasi partai serta keputusan pilihan politik bagi pemilih pemula berorientasi pada aspek parokial dan kaula.

Pertimbangan pilihan politik selain dilatarbelakangi oleh factor sosiologis, psikologis dan rasional, pendekatan tersebut sangat ditentukan oleh budaya politik sebagai hasil afiliasi dan interaksi social masyarakat dalam lingkungan keseharian. Budaya politik sebagai preferensi politik utama bagi masyarakat untuk melakukan pertimbangan politik, nilai atau norma dalam masyarakat akan mendorong pemilih terpola pada aspek pendekatan perilaku politik. Bagi masyarakat berkemaang atau masyarakat moderen yang tinggal di desa maupun kota dengan tinggat konsumsi informasi dan komunikasi tinggi akan sangat kritis tergadap perferensi politik meraka dalam mengambil keputusan politik. Begitupun sebaliknya bagi masyarakat kampus dengan tingkat pencerdasan politik berbeda dengan

³ Ramli Mahmud, Perilaku Memilih Masyarakat Kota Gorontalo Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2008. Tesis Pascasarjana UGM, 2010

⁴ Ramli Dkk. Penelitian PNBK Fakultas Ilmu Sosial, Orientasi Perilaku Politik Pemula Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Goronntalo Tahun 2017

masyarakat diluar kampus, hal ini di karenakan mahasiswa memiliki nalar kekritisn yang tinggi terhadap dinamika social politik.

Akankah dengan nalar kekritisn bagi mahasiswa didalam kampus akan terpola pada lingkungan masyarakat dimana mereka tinggal. Dalam aspek pendekatan perilaku politik kegorontaloan, nalar kekritisn mahasiswa tidak terjewantahkan dalam kehidupan politik mereka. Dari aspek kategorisasi jender, sebahagian mahasiswa laki-laki memiliki rasionalitas dengan nalar kekritisn dalam pilihan politik, sedangkan hampir secara keseluruhan preferensi politik dan keputusan pilihan politik mahasiswa perempuan dipengaruhi oleh pilihan politik kepala keluarga⁵. Jika dilihat dari aspek jumlah pemilih perempuan, data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo tahun 2017 menunjukkan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) perempuan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 397.019 orang dari total pemilih 791.129. Hal ini menandakan bahwa jumlah pemilih perempuan mendominasi pemilih laki-laki, walaupun pada segi sex rasio hanya berkisar 0,99% tingkat perbedaannya.

. Dengan merujuk pada permasalahan di atas, penelitian ini lebih fokus dalam mengamati dan mengidentifikasi orientasi budaya politik perempuan dengan melakukan studi terhadap preferensi politik dan keputusan pilihan politik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo pada setiap perhelatan demokrasi. Atas hal tersebut, penelitian ini akan mendapatkan solusi dalam pendekatan orientasi budaya politik perempuan dalam mengambil keputusan politik pada penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilukada.

1.1 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

1. Apa orientasi budaya politik pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum ?
2. Bagaimana peran keluarga dalam dalam membentuk orientasi budaya politik pemilih perempuan ?

B. Orientasi Budaya Politik Perempuan

Budaya politik sebagai: "Suatu sikap orientasi yang khas warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada di dalam sistem tersebut"⁶.selain itu Miriam Budiardjo menyatakan bahwa salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik

⁵ Ramli Mahmud, Perilaku Memilih Masyarakat Kota Gorontalo Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2008. Tesis Pascasarjana UGM, 2010 hal. 82

⁶ Lihat Almond. A Gabriel dan Verba. 1990. Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara . Jakarta: Bumi Aksara hal-14

mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu, dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya⁷.

Berdasarkan orientasi-orientasi warga negara terhadap kehidupan politiknya atau budaya politiknya, Almond dan Verba membaginya dalam tiga tipe budaya politik, yakni 1) budaya politik parokial : spesialisasi peranan-peranan politik atau tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan faktor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relatif rendah). Budaya politik parokial juga ditandai oleh tidak berkembangnya harapan-harapan akan perubahan yang akan datang dari sistem politik. 2) budaya politik kaula atau subjek, secara umum mereka menerima segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pejabat yang berwenang dalam masyarakat, 3) budaya politik partisipan, suatu budaya politik dimana warga masyarakatnya sudah memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur, proses politik, dan administratif⁸.

Jika ditelisik lebih jauh, aspek budaya politik parokial dan kaula menjadi referensi terpenting bagi masyarakat dalam mengambil keputusan politik pada masa kini. Studi yang dilakukan oleh Rusadi Kantaprawira 1988 mengatakan bahwa Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhkan sikap paternalisme dan patrimonial⁹. Dalam konteks budaya politik, indikator yang bisa diukur antara lain "asal bapak senang (bapakisme)". Dengan demikian maka tipe budaya politik parokial dan kaula lebih selaras dan tumbuh berdasarkan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang didalam ketertundukan dari anggota keluarga terhadap kepala keluarga atau individu yang berpengaruh di dalam keluarga tersebut.

Uregensinya dengan orientasi budaya politik perempuan, tipologi pemilih menjadi rujukan tata nilai bagi pemilih untuk bersikap dan memutuskan pilihan politik. Dengan demikian maka, untuk menyikapi orientasi budaya politik pemilih perempuan khususnya mahasiswa, maka tipologi pemilih bisa dijelaskan lewat pemikiran Firmanzah 2012¹⁰ yang membagi tipologi pemilih terdiri dari empat bagian, diantaranya :

1. Pemilih Rasional, pemilih pada level ini tidak mementingkan fantismenya pada pada partai politik maupun seorang kandidat, mereka cenderung melihat apa yang telah dilakukan oleh partai politik maupun kandidat

⁷ Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Gramedia Pustaka. Jakarta. Hal 58-59, serta lebih eksplisit di bahas dalam Alie, Marzuki. (2013). Pemasaran *Politik* di Era Multipartai. Jakarta: Expose

⁸ Lihat Almond. A Gabriel dan Verba. 1990. Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara . Jakarta: Bumi Aksara hal 18-22

⁹ Lihat Rusadi Kantapawira, 1988. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung. CV Sinar Baru. Hal. 30

¹⁰ Firmanzah, 2012, Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas, edisi revisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal 120-126

sebelumnya dengan hitungan untung rugi. Budaya politik parokial dan kaula tidak signifikan dalam tipologi ini.

2. Pemilih Kritis, artinya pemilih akan selalu menganalisis ideologi partai politik atau kandidat dengan kebijakan yang telah dan akan dilakukan, sehingganya mereka akan selalu memiliki keinginan untuk memperbaiki kinerja dan kebijakan partai atau kandidat. Ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan maka mereka akan mengalihkan pilihan politiknya pada partai atau kandidat lain. Dengan demikian maka, tipologi ini merupakan perpaduan antara orientasi pada kemampuan partai politik atau seorang kontestan dan orientasi mereka akan hal-hal yang bersifat ideologis.
3. Pemilih tradisional, Pemilih memiliki orientasi ideology yang sangat tinggi, dalam mengambil keputusan politik tidak mempertimbangkan aspek rasional maupun kritis. Preferensi politik mereka berdasarkan pada kedekatan sosial-budaya, nilai asal-usul, paham, dan agama. Pemilih tradisional adalah jenis pemilih yang bisa dimobilisasi selama periode kampanye, loyalitas tinggi merupakan salah satu ciri khas yang paling kelihatan bagi pemilih jenis ini.
4. Pemilih Skeptis, ikatan ideologis pemilih terhadap partai maupun kandidat sangat rendah, dengan demikian maka preferensi politik mereka sangat kurang, hal ini ditandai dengan sikap apatis pemilih serta tidak mempedulikan ideologi partai maupun program kerja dan kebijakan partai politik maupun kandidat.

Dengan merujuk pada teori di atas maka, seharusnya orientasi budaya politik perempuan khususnya bagi kalangan mahasiswa terpola pada tipologi pemilih rasional dan kritis. Ketika kerangka tipologi pemilih ini menjadi orientasi pilihan politik maka, aspek orientasi budaya politik partisipan bagi pemilih perempuan akan dapat meningkatkan kesadaran dan kecerdasan politik bagi perempuan dalam menentukan pilihan politik tanpa intervensi pihak lain termasuk keluarga. Tentunya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa melalui Pendidikan tinggi dapat membentuk sikap politik yang rasional dan kritis serta berorientasi pada budaya politik partisipan, rasional dalam berpikir, kritis dalam bersikap akan melahirkan kesadaran partisipasi politik tanpa intervensi dalam menentukan pilihan politik.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Instrumen yang dipakai berbentuk: observasi, wawancara dan dokumentasi dengan lokasi penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo yang didasarkan pada pertimbangan bahwa pada tahun 2019 akan dilaksanakan pemilihan Umum. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dokumentasi dengan tahapan penelitian melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pemeriksaan kesimpulan dan verifikasi.

D. Orientasi Budaya Politik Perempuan

Sebagai Negara demokrasi moderen, keterlibatan partisipasi politik perempuan dalam mengambil keputusan politik sangat penting dilakukan agar bisa keluar dari dikotomi kelemahan dan letak ketertundukan laki-laki terhadap perempuan. Antara laki-laki dan perempuan mempunyai kesamaan hak, baik dimata hukum maupun dalam konteks afiliasi sosial politik. Konteks inilah kemudian, aspek kesetaraan sangat penting diilhami sebagai bentuk pendewasaan dan kecerdasan politik bagi perempuan. Belenggu yang selama ini sebagai stigma dalam struktur sosial masyarakat atas kelemahan yang dimiliki perempuan yang mengambil keputusan dirinya harus sesuai dengan apa yang diilhami oleh laki-laki telah membuat perempuan tereliminasi dalam stuktur sosial masyarakat.

Namun demikian, perangkat hukum kita menjamin dan melegitimasi partisipasi politik perempuan dalam segala bidang, baik keterlibatan perempuan dalam struktur formal Negara maupun kebebasan perempuan dalam menentukan hak politiknya. Akan tetapi hingga saat ini, antara perempuan dengan dunia politik merupakan dua hal yang tidak mudah untuk dipersatukan. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di lembaga formal negara masih sangat rendah jumlahnya bila dibandingkan dengan laki-laki hingga pada level privatisasi politik perempuan dalam menentukan pilihan politik pun berdasarkan pada pilihan politik laki-laki. Dengan demikian maka, arena kontestasi dan sikap politik perempuan selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, disisi lain tidak bisa dinafikan bahwa fenomena tersebut di atas tidak terlepas dari keyanikan nilai yang mengingat kehidupan sosial masyarakat kita yang secara akar budayanya tidak bisa dipisahkan dari aspek budaya politik parokial dan kaula.

Fenomena tersebut juga terjadi bagi pemilih perempuan khususnya mahasiswi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo. Sebagai masyarakat kampus, nalar kekritisian dan rasionalitas mahasiswa sebenarnya sudah diasah sedemikian rupa. Lebih khusus mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial yang secara akademik berkecimpung dengan teori-teori sosial dan politik seharusnya peka terhadap permasalahan di luar kampus yang berhubungan dengan pendidikan dan pencerdasan politik masyarakat, namun patut di akui bahwa daya kekritisian dan rasionalitas mahasiswa tersandra oleh nilai budaya masyarakat di luar kampus. Hal ini yang kemudian menyebabkan tidak sinkronnya orientasi budaya politik partisipan mahasiswa yang merujuk pada aspek nalar kritis dan rasional dengan aspek sikap pilihan politik pada setiap perhelatan demokrasi. Merujuk pada data lapangan terungkap bahwa, dalam kesadaran kolektif dan ambisi idealis mahasiswi sebagai pemilih perempuan sangat optimis akan rasionalitas yang berlatar pada orientasi budaya politik partisipan,

Rasionalitas serta kekritisannya mahasiswa dalam mengambil keputusan pilihan politik merujuk pada visi-misi dan program kerja calon kandidat. Orientasi tersebut juga lebih ditekankan pada aspek mazhab pilihan rasional dalam studi perilaku politik. Dimana pemilih memilih calon figure, kandidat atau partai politik berdasarkan pada hitungan ekonomis atau untung dan rugi. Ketika memilih apa keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pemilih ketika memilih calon atau partai tertentu.

Selain dari orientasi program kerja dan visi misi calon atau partai, ada kecenderungan menarik dari orientasi budaya politik yang berhubungan dengan *trac record* serta motivasi untuk memperoleh informasi mengenai tawaran visi-misi, program kerja serta *trac record* calon atau partai politik. Kecenderungan orientasi pemilih pada level ini, sebenarnya lebih kritis dan rasional jika dibandingkan dengan argumentasi responden di atas. Dimana, pemilih pada level ini tidak akan pernah puas dengan informasi yang mereka peroleh, kecenderungan mereka akan mencari informasi yang berhubungan dengan calon kandidat atau partai politik hingga mereka benar-benar yakin atas pilihan politik mereka berdasarkan pada informasi yang mereka yakini kebenarannya.

Artinya bahwa mereka lebih merepresentasikan keterpilihan politiknya pada seberapa besar kepuasan akan informasi mengenai calon kandidat atau partai politik yang mereka yakini akan mampu menjawab semua kebutuhan mereka sesuai dengan pencarian informasi yang diperoleh. Pemilih pada level ini adalah pemilih yang sangat kritis atas keputusan politik yang di ambil dalam menentukan pilihan politik berdasarkan pada seberapa besar input informasi yang mereka dapat.

Berangkat dari uraian di atas maka, dapat digaris bawahi bahwa pemilih perempuan khususnya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo dalam orientasi budaya politiknya secara kesadaran individual merujuk pada orientasi budaya politik partisipan. Artinya bahwa keputusan pilihan politik untuk memilih calon figur atau partai politik berdasarkan pada pertimbangan politik secara rasionalitas dan memiliki daya kekritisannya dalam menentukan pilihan politik mereka. Argumentasi tersebut searah dengan apa yang dikemukakan oleh Firmansah (2012), bahwa pemilih rasionalitas dan pemilih kritis memiliki kecenderungan pada hitungan untung rugi dan memiliki motivasi untuk mengevaluasi atas apa yang dilakukan oleh calon figure atau partai politik pada masa kekuasaan atau pengalaman yang dimiliki sebelumnya.

Sesuai dengan data yang diperoleh, ukuran rasionalitas dan kekritisannya orientasi pilihan politik menjadi rujukan penting bagi pemilih untuk menentukan pilihan politik, akan tetapi keputusan memilih kandidat atau partai politik sangat dipengaruhi oleh pilihan politik kepala keluarga. Pada bagian penulisan di atas telah dijabarkan pola orientasi politik bagi mahasiswi yang sudah mengikuti pemilihan

umum dan pemilihan kepala daerah, dimana nalar kekritisn dan rasional mereka sangat tajam dalam mempertimbangkan pilihan politik.

Kepala keluarga mempunyai peran penting dalam menentukan pilihan politik anggota keluarga, khususnya adalah anak perempuan. Pemilih mempunyai keyakinan akan sikap dan pilihan politik kepala keluarga sebagai pilihan yang terbaik buat keluarga. Selain peran bapak sebagai kepala keluarga, ibu juga sangat berperan aktif dalam menentukan pilihan politik anak. Kecenderungan pilihan politik berdasarkan pada pilihan ibu dikarenakan tidak ada kepala keluarga. Dengan demikian maka sangat urgen ketika budaya kaula dan parokial menjadi nilai dasar bagi pmilih untuk menentukan pilihan politiknya. Hal ini bisa tergambarkan lewat situasi sikap politik yang memiliki patron dalam ikatan keluarga, seperti sikap dan pilihan politik mengikuti Bapak, ketika bapak tiada maka, pertimbangan politik pemilih lebih pada pertimbangan kaka tertua laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki tertua, maka pertimbangan pilihan politik berdasarkan pada pilihan politik ibu. Sangatlah jelas bahwa kepala keluarga, ibu, anak laki-laki tertua adalah sebagai agen dalam mengtrasfer nilai dan sikap politik yang dianggap hakiki oleh perempuan dalam menentukan sikap dan pilihan politik.

E. PERAN KELUARAGA DALAM MEMBENTUK ORIENTASI BUDAYA POLITIK PEREMPUAN

Sebagai agen sosialisasi politik, kehidupan keluarga memegang peran penting bagi pembentukan karakter dan orientasi politik anggota keluarganya. Ketika anak mengenal melek huruf atau warna, maka sosialisasi dan pendidikan politik sudah dimulai saat itu juga. Artinya bahwa, kecenderungan orientasi politik anak untuk memilih warna kuning, merah, biru, hijau, hitam dan lain sebagainya bisa diidentifikasi kecenderungan argumentasi dan kecenderungan politiknya pada partai yang akan di sukai oleh anak tersebut. Ulasan kognitif awal ini yang akan kemudian berdampak pada pola sikap dan perilaku anak atau anggota keluarga dalam menentukan pilihan politik. Ketika kepala keluarga berorientasi pada partai tertentu maka, anggota keluarga pun mempunyai sikap perilaku yang sama seperti orientasi politik kepala keluarga.

Dengan demikian maka, orientasi politik adalah bagian terpenting dalam sosialisasi politik. Sosialisasi politik dalam lingkungan keluarga merupakan proses transfer nilai-nilai dan sikap serta keputusan pilihan politik yang dianggap paling ideal dalam anggota keluarga. Searah dengan hal tersebut Cholisin (Efriza, 2012 : 6) mengatakan bahwa sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi politik dan budaya politik agar warga negara memiliki kematangan politik. Peranan keluarga dalam membentuk orientasi politik merupakan kontribusi penting terhadap pendidikan politik bagi anggota keluarga, dimana ayah, ibu dan

saudara kandung dapat menjadi panutan dan komunikator terhadap ide-ide politik dalam menentukan pilihan politik.

Kecenderungan ini terjadi bahkan di seluruh stratifikasi masyarakat kita dikarenakan budaya politik masyarakat kita berorientasi pada budaya politik parokial dan kaula. Dimana keputusan politik seseorang berdasarkan pada agen struktur sosial, hingga pada struktur lingkungan kecil yaitu keluarga. Seperti apa yang dikemukakan oleh Mc Closky dan Dahlgren (Richard, Kenneth, 1969 : 135) mengemukakan bahwa keluarga merupakan agen penerus untuk mendefinisikan afiliasi partai setiap anggotanya. Hal ini didukung oleh berbagai riset mengenai perilaku politik perempuan khususnya di Indonesia yang sangat kental dengan budaya parokial dan kaula. Hasil riset tersebut menunjukkan bahwa sebahagian besar keputusan politik pemilih pada setiap pemilihan dipengaruhi oleh keputusan politik kepala keluarga. Dimana, kepala keluarga sangat mempunyai peran penting dalam menentukan pilihan politik anggota keluarga. Begitupun sebaliknya jikalau tidak ada kepala keluarga maka keputusan politik anggota keluarga ditentukan oleh anak laki-laki tertua, dan jika tidak ada saudara laki-laki, maka peran ibu sangat mempengaruhi orientasi perilaku politik anggota keluarga dan menentukan pilihan politiknya.

Keluarga adalah bagian dari agen sosialisasi politik dalam membentuk sikap dan orientasi politik khususnya pemilih perempuan. Pada tahapan ini sangat sulit buat kita untuk menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai pemilih perempuan akan berorientasi pada budaya politik partisipan yang mempunyai nalar rasional dan daya kritis yang di asah melalui kehidupan kampus. Begitupun sebaliknya, dalam konteks budaya politik parokial tidak sesuai dengan tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh mahasiswa. Oleh sebab itu, secara garis besar dapat dipahami bahwa orientasi budaya politik mahasiswa perempuan lebih mengarah pada budaya politik kaula, dimana keputusan dan pilihan politik mereka merujuk pada pilihan politik kepala keluarga sebagai patron yang bersifat mengikat dalam lingkungan keluarga. Selain dari peran bapak sebagai kepala keluarga, Ibu juga sangat berperan dalam membentuk orientasi budaya politik perempuan.

Ada hal lain yang menarik dilihat pada peranan ibu dalam menentukan pilihan politik bagi anggota keluarga, dimana keputusan dan pilihan politik bapak dan anak sangat ditentukan oleh pilihan politik ibu. Begitupun sebaliknya putusan pilihan politik dari ibu dan anak yang ditentukan oleh pilihan politik keluarga. Artinya bahwa dalam membentuk orientasi budaya politik perempuan tidak hanya berpatokan pada anggota keluarga di dalam rumah, akan tetapi di pengaruhi juga oleh ikatan keluarga sedarah. Menyangkut dengan peranan ibu dalam menentukan pilihan politik anggota keluarga

Dengan demikian maka, tidak semuanya kecenderungan orientasi budaya politik yang membentuk pola sikap dan pilihan politik seseorang tergantung dari kecenderungan bapak sebagai kepala rumah tangga. Akan tetapi peranan tersebut

juga bisa diambil oleh seorang wanita atau ibu. Budaya politik kaula yang dimaksudkan tidak hanya berpatokan pada keberadaan bapak sebagai kepala keluarga, akan tetapi posisi ibu juga dapat berperan aktif dalam membentuk orientasi budaya politik kaula dalam menentukan pilihan politik keluarga. Selain dari peranan ibu, ikatan keluarga sedara juga memegang peran penting dalam membentuk orientasi budaya politik perempuan,

Budaya politik kaula merupakan aspek nilai yang menjadi pertimbangan utama bagi perempuan khususnya mahasiswa dalam menentukan pilihan politik. Kecerdasan dan ukuran tingkat pendidikan seseorang tidak menjamin rasionalitas dalam pilihan politik serta kecerdasan sikap politik. Jika dirunut, teorinya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin peka dan rasional dalam kecerdasan politik untuk menentukan pilihan politik. Artinya, pada level ini pemilih seharusnya lebih rasional, dalam pendekatan perilaku politik disebut dengan pilihan rasional. Hitungan matematik dan ekonomi menjadi rujukan pertimbangan pemilih sebelum menentukan sikap dan pilihan politik yang berdasarkan pada hitungan untung rugi, jika memilih calon atau partai, apa keuntungan dan kerugian yang diperoleh.

Dalam konteks perilaku politik, pendekatan sosiologis dan identifikasi partai menjadi pertimbangan pemilih perempuan khususnya mahasiswa untuk menentukan pilihan politik. Dilain sisi, dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan tinggi membuat pertimbangan pilihan politik sangat rasional, sementara aspek sikap dan pilihan politik lebih cenderung mengikuti pilihan orang tua dan ikatan keluarga yang lebih dekat dengan pertimbangan sosiologis. Sementara transformasi partai politik menjadi agenda terpenting dalam menentukan pilihan politik perempuan, pemilih memilih calon karena pertimbangan partai politik serta memilih partai politik karena pertimbangan pilihan orang tua dan ikatan keluarga.

Jika dikaitkan dengan tipologi politik Firmanzah (2012), harusnya tingkat pendidikan seseorang khususnya mahasiswa akan lebih rasional dan kritis dalam menentukan pilihan politik, dengan pengetahuan yang dimiliki membuat pertimbangan politiknya dilakukan dalam keadaan sadar tanpa ada dorongan dan pengaruh dari pihak lain. Akan tetapi data tersebut di atas menunjukkan bahwa tipologi pemilih perempuan khususnya mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo lebih cenderung pada tipologi pemilih tradisional. Pemilih pada level ini memiliki loyalitas orientasi ideology yang kuat sehingga keputusan pilihan politiknya berdasarkan pada pertimbangan sosial-budaya, nilai, asal-usul, paham dan agama.

Merujuk pada kedua pendekatan di atas maka, perilaku politik dan tipologi pemilih didasari pada preferensi orientasi budaya politik dimana pemilih berafiliasi. Dalam segi afiliasi sosial, tentunya pemilih tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, sekolah dan lingkungan keluarga. Akan tetapi menyangkut

dengan penentuan sikap dalam menentukan pilihan politik faktor lingkungan keluarga yang sangat berpengaruh terhadap sikap pemilih. Secara teoritis, Almond dan Verba (1990) mengidentifikasi tiga indikator yang mempengaruhi orientasi budaya politik seseorang, yakni parokial, kaula dan partisipan. Dari segi pendekatan perilaku politik dan tipologi pemilih perempuan khususnya mahasiswa FIS UNG yang didukung melalui data dan temuan lapangan, dapat digaris bawahi bahwa, pemilih dalam menentukan pilihan politik berorientasi pada budaya politik kaula, dimana peranan kepala keluarga dan ikatan darah menjadi prioritas utama pemilih dalam menentukan pilihan politik.

Hal demikian terjadi juga pada saat Pemilu 2019 mendatang, dimana pada tingkat keyakinan yang tinggi dari responden terlihat bahwa tidak akan terjadi pergeseran orientasi dalam menentukan pilihan politik. Artinya bahwa, pemilih benar-benar yakin atas pola sikap dan pola pikir atas tindakan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan orang tua dan ikatan dara. Stigma tersebut akan membuat pemilih menutup diri dengan berbagai macam kemungkinan, termasuk motifasi untuk mencari informasi hanya bersumber dari satu arah, pemilih akan menutup dirinya dengan berbagai macam informasi yang berhubungan dengan calon atau partai lain, mereka akan membuka diri dan termotifasi mencari informasi hanya pada calon atau partai politik yang akan di pilih oleh orang tua atau yang bersumber dari ikatan keluarga mereka.

Dengan demikian maka, temuan hasil penelitian ini akan menggugurkan semua spekulasi dalam tatanan akademik bahwa rasionalitas politik¹¹ sangat di dukung oleh tingkat pendidikan pemilih. Asumsi pemilih cerdas yang diukur lewat tingkat pendidikan sebagai rasio dari rasional pemilih tidak sinkron dengan fakta lapangan. Jika ukuran tingkat pendidikan diasumsikan dapat mengukur tingkat kecerdasan dan rasionalitas politik pemilih maka, pemilih perempuan khususnya mahasiswa di FIS UNG dalam menentukan pilihan politiknya lebih mengarah kepada orientasi budaya politik Partisipan serta mencirikan tipologi rasional dan kritis. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa orientasi budaya politik perempuan dalam menentukan pilihan politiknya pada pemilu 2019 lebih cenderung pada orientasi budaya politik kaula.

F. Kesimpulan

Mengidentifikasi orientasi budaya politik membutuhkan langkah kehati-hatian dalam menginterpretasi data, karena kadang kala stigma yang terbangun

¹¹ Catatan Almond dan verva (1990) budaya politik partisipan ditunjukkan lewat kesadaran pemilih dalam menentukan pilihan politiknya berdasarkan pada hitungan nilai rasional kebutuhan seseorang. Begitupun sebaliknya Firmzah (2012) tipologi pemilih yang rasional dan kritis adalah preferensi politik yang berdasarkan pada hitungan untung rugi, tanpa ada paksaan dan himauan serta interfensi dari pihak lain.

mengalami keaburan dalam menjustifikasi psikologi pemilih. Namun dilain sisi peneliti meyakini bahwa preferensi orientasi budaya politik perempuan akan berbeda dengan preferensi budaya politik laki-laki. Dalam penelitian ini, fokus peneliti adalah bagaimana melihat orientasi budaya politik perempuan khususnya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universita Negeri Gorontalo dengan point penting sebagai berikut :

Pertama, orientasi budaya politik perempuan khususnya mahasiswa dalam pemilihan Kelapa Daerah maupun Pemilu 2019 lebih mengarah pada orientasi budaya politik kaula. Sebagai mahasiswa, pemilih lebih berorientasi pada orientasi budaya politik partisipan. Akan tetapi dalam hal keputusan pililhan poltik terhadap calon atau partai politik pemilih lebih cenderung memilih calon atau partai politik yang dipilih oleh orang tua dari pada pertimbangan rasinal dan daya kekritisn pemilih.

Kedua, Keluarga sebagai agen sosialisasi politik sangat menentukan orientasi budaya politik pemilih. Hal ini bisa dilihat dari peranan keluarga dalam menentukan pilihan politik pemilih. Sikap dan pilihan politik orang tua menjadi preferensi utama pemilih dalam menentukan pilihan politik anak. Dengan demikian maka, keluarga sangat berperan aktif dalam menentukan orientasi budaya politik bagi anggota keluarga, oleh sebab itu orietnasi budaya politik perempuan khususnya mahasiswa dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilihan umum 2019 sangat dipengaruhi oleh orientasi budaya politik kaula,

SUMBER BACAAN :

- Afan Gaffar. 1992. *Javanese Voters: A Case Study Of Election Under AHegemonis Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Almond. A Gabrriel dan Verba. 1990. *Budaya Politik Tingkah laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara* . Jakarta: Bumi Aksara
- Alie, Marzuki. (2013). *Pemasaran Politik di Era Multipartai*. Jakarta: Expose
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.
- David Moon, 1992. *The determinants of turn out in presidential elections : an integrative model accounting for information, in the political behaviour*. Vol.14. No.2.
- Efriza, 2012. *POLITICAL EXPLORE: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfabeta.CV, Bandung,
- Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Firmanzah, 2012, *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas*, edisi revisi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Harrison, Lisa. (2007). Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Prenada Media Grup
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya,

- Milles, Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah: Tjejep Rohendi Rohidi. UI Press:Jakarta
- Ramli Mahmud.2010, Perilaku Memilih Masyarakat Kota Gorontalo Pada Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Tahun 2008. Tesis Pascasarjana UGM,
- Riswanda Imawan 1997, Membedah Politik Orde Baru. Pustaka Pelajar(anggota IKAPI). Yogyakarta
- Richard E. Dawson dan Kenneth Prewitt, 1969. Political Socialization, Little, Brown and Company, Canada
- Rusadi Kantapawira, 1988. Sistem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Bandung. CV Sinar Baru
- Saifudin Aswar, 1998, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, edisi kedua, Pustaka Pelajar Yogyakarta,.
- Sugiyono. 2010. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Rush &P.Althoff (2005), Sosiologi Politik, Rajawali Press; Jakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum